



KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

LKjIP

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

2021



KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 telah selesai disusun. Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan target dan realisasi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Segenap apresiasi dan terima kasih atas peran aktif segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta dukungan instansi dan masyarakat dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang **Mandiri, Maju dan Sejahtera**.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat secara keseluruhan.

Tapejat, Maret 2022
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
YUDAS SABAGGALET



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	4
1. Permasalahan Pembangunan	4
2. Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Visi	25
2.2 Misi	25
2.3 Tujuan dan Sasaran	26
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	32
2.5 Indikator Kinerja Daerah	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja	53
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	54
3.3 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	55
3.4 Realisasi Indikator Kinerja	74
3.5 Analisis Pembiayaan	82
3.6 Realisasi Capaian Keuangan	85
3.7 Raihan Penghargaan Pemerintah Kabupaten	
Kepulauan Mentawai	88
BAB IV PENUTUP	90



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Tuapejat KM. 4 Sipora Telp. (0759) 320051, Fax. (0759) 320212

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tuapejat, 29 Maret 2022

INSPEKTUR



Drs. MIKO SIREGAR, M.Si

NIP. 19621012 198609 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab serta untuk menciptakan *clean government* dan *good governance*, maka LKjIP merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya sekedar menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2021, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Tahun 2021 merupakan Tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran belum menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam



Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 **BELUM BERHASIL** dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Dari 37 indikator sasaran, terdapat 19 indikator dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi, 3 indikator dengan realisasi kinerja yang tinggi, 1 indikator dengan realisasi kinerja sedang, 8 indikator dengan realisasi kinerja yang sangat rendah, 1 indikator tercapai, dan 5 indikator tidak tercapai.
2. Dari 171 indikator kinerja daerah, terdapat 78 indikator yang mencapai target dan 93 indikator belum mencapai target.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa sebagian besar belum menggunakan sumber daya dengan efisien. Hal ini tergambar dari tingkat capaian realisasi anggaran yang mencapai angka 82,09%.

Salanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan capaian tujuan dan sasaran sesuai target yang telah ditetapkan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada capaian kinerja yang tertuang di dalam RPJMD, sehingga seluruh program/kegiatan harus mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Kepulauan Mentawai.



2. Memberikan pemahaman kepada setiap pimpinan Perangkat Daerah terhadap penyelarasan *cascading* dan penyusunan rencana aksi pada setiap level jabatan yang pada akhirnya bermuara pada penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Dengan kondisi geografis yang ada, pemerintah terus mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi sehingga mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dalam pencapaian kinerja organisasi.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, sehingga tercipta pemahaman yang memadai dan merata antar Perangkat Daerah.
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda dan penanggung jawab program untuk meningkatkan kualitas evaluasi program guna mendorong efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran program dan kegiatan di dalam APBD.

Demikian ikhtisar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berbagai kekurangan yang terjadi, tentunya menjadi pemacu untuk bekerja dan berusaha lebih baik demi mewujudkan “*MENTAWAI YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA*”.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Indiktor Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, sebagai bentuk komitmen Pimpinan mulai dari Kepala Daerah sampai Kepala Perangkat Daerah yang telah menandatangani Perjanjian Kinerja. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017–2022 disamping menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk kurun waktu 2017-2022, juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjabarkan arah dan strategi pembangunan Tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017–2022 beserta perubahannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi



mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran, disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program dan indikator di dalam RPJMD yang tugas dan fungsinya diamanahkan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah analisis pengukuran kinerja dan evaluasi yang memadai.

1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak antara 0°55'00"-3°21'00' Lintang Selatan dan 98°35'00"-100°32'00' Bujur Timur dengan luas wilayah 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai berbatasan dengan:

- sebelah Utara berbatasan dengan Selat Siberut;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas gugusan pulau-pulau yang berjumlah sebanyak 99 buah. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan, 43 Desa dan 341 **buah Dusun**.

Tabel 1.2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	2 ° 49'04"-3 ° 21'00"	100 ° 07'01"-
2	Sikakap	Taikako	278,45	2 ° 37'12"-3 ° 55'04"	100 ° 00'00"-
3	Pagai Utara	Saumanganya	342,02	2 ° 30'00"-2 ° 51'36"	99 ° 57'00"-
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	2 ° 06'00"-2 ° 24'36"	99 ° 36'00"-99 ° 52'12"
5	Sipora Utara	SidoMakmur	383,08	1 ° 57'00"-2 ° 18'00"	98 ° 30'00"-99 ° 42'00"



No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang Selatan	Bujur Timur
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	1 ° 19'48"-1°42'00"	98 ° 48'00"-99 ° 18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	1 ° 27'36"-1°57'00"	98 ° 45'00"-99 ° 19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	1 ° 15'00"-1°33'00"	98 ° 54'00"-99 ° 12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabalu	816,11	0 ° 54'00"-1°27'00"	98 ° 40'48"-99 ° 06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	0 ° 55'00"-1°34'12"	98 ° 35'00"-98 ° 59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 36 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Dinas Perikanan;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;



19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Keuangan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
26. Rumah Sakit Umum Daerah.
27. Kecamatan Pagai Selatan;
28. Kecamatan Pagai Utara;
29. Kecamatan Sikakap;
30. Kecamatan Sipora Selatan;
31. Kecamatan Sipora Utara;
32. Kecamatan Siberut Selatan;
33. Kecamatan Siberut Barat Daya;
34. Kecamatan Siberut Tengah;
35. Kecamatan Siberut Selatan; dan
36. Kecamatan Siberut Barat.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi/dikelola, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sementara isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan.



Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 telah membuahkan hasil walaupun belum maksimal karena ada beberapa indikator makro yang masih perlu perhatian dan penanganan serius seperti pada infrastruktur, konektivitas dan kualitas lingkungan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional.

a. Merupakan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu satunya kabupaten tertinggal di Propinsi Sumatera Barat. Penetapan ini menjadi pertanda bahwa masih terbatasnya/ rendahnya capaian pembangunan terkait perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Di Tahun 2021, desa maju ada 5 desa dan desa tertinggal sebanyak 12 desa.

Indikator makro yang dapat dilihat dari penyebab masih ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai masih daerah tertinggal adalah masih rendahnya capaian seperti pada Tabel berikut.

Tabel 1.4.1
Indikator Penyebab Ketertinggalan

No	Penyebab Ketertinggalan	Indikator Ketertinggalan	Satuan	ata-Rata Capaian	Rata-Rata Nasional	Rata-Rata Propinsi
1	Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	persen	4,98	5,09	5,16
		Pendapatan Per Kapita	Juta/ Kapita/ Tahun	48,44	53,90	42,70
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,07	5,48	5,41
		Penduduk Miskin	persen	14,51	6,80	9,43
2	Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	persen	60,26	71,37	71,77
		Rata Lama Sekolah	tahun	6,92	8,07	8,69
		Angka Melek Huruf	persen	97,47	95,69	99,03
		Angka Harapan Hidup	tahun	64,47	71,05	68,84



No	Penyebab Ketertinggalan	Indikator Ketertinggalan	Satuan	ata-Rata Capaian	Rata-Rata Nasional	Rata-Rata Propinsi
3	Sarana dan Prasarana	Rasio Elektrifikasi	rasio	63,23	97,71	94,87
		Rumah Layak Huni	persen	54,53	82,42	80,40
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	persen	30,68	78,48	72,38
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	persen	43,3	71,52	57,87
4	Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	persen	5,44	NA	35,92
5	Aksesibilitas	Jalan Mantap	persen	5,53		
		Layanan telekomunikasi	persen	74,33		
6	Karakteristik Daerah	Bencana yang tertangani pada tanggap darurat dan RR	persen	92,5		

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD 2017-2022

Indikator daerah tertinggal yang sangat memerlukan perhatian dan intervensi program pembangunan antara lain pada aksesibilitas, sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia.

b. Merupakan Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng *Sundaland* di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar di Mentawai diantaranya terjadi pada Tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), Tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan Pulau Painan (7,7 SR), dan Tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR). Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Bengkulu (Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008).

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010,



bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Jika dilihat dari analisis kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di Kepulauan Mentawai, gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, dan abrasi memiliki kecenderungan peningkatan intensitas.

Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, banjir serta epidemi dan wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk masing-masing ancaman. Begitu juga jika dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi ke dalam 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33), sedang (>0,33 - 0,66) dan tinggi (>0,66 - 1,00).

Tabel 1.4.2
Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Sedang
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
8	Kekeringan	Tinggi
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang

Sumber : BPBD Kab. Kep. Mentawai

Tabel 1.4.2 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Tingkat bahaya sedang berpotensi terhadap bencana



gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya rendah terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit.

c. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 14,43 persen pada Tahun 2019, dan ini diprediksi akan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya pada sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Mentawai.

d. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau Maupun antar Daerah Juga Kesenjangan Sosial Ekonomi Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik

Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi patokan menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas pendapatan begitu juga semakin bekurangnya kesenjangan sosial lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, bukan berarti pertumbuhan ekonomi menjamin kemakmuran penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan



pembangunan idealnya harus menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2019 berada pada angka 89,33 (BPS, 2020) dan menempati posisi 18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas Kabupaten Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah dimana deviasi antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan > 10%.

Namun di sisi lain, nilai IDG di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif sama dengan kondisi di Sumatera Barat dimana pada Tahun 2019. Angka IDG Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka 48,36 (BPS, 2020) yang menempati posisi 19 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

e. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum terkelola (Hulu-Hilir) dengan baik yaitu Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Produk komoditi pertanian belum dikembangkan secara terpadu/terintegrasi baik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya begitu juga belum pada *market oriented*, belum lagi jika dilihat dari kapasitas penyusul dan petani yang masih sangat tradisional. Indikator ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,84 persen.

Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi amenities, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu juga dengan *branding* dan promosi yang masih sangat terbatas, juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif sebagai unsur



pendukung pemasaran dan pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dan masyarakat. Indikator capaian ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 0,77 persen.

f. Daya saing yang rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi, Regulasi, Tata Kelola Pemerintah, Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil, Telekomunikasi)

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, akan tetapi juga pembenahan pada sumberdaya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian daerah, tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi masih sangat rendah.



2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

a. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan pencapaian *Sustainable development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai di Tahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tidak meninggalkan satu orangpun (*No-one Left Behind*) merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan substantial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:



1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai upaya dalam mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selanjutnya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu isu strategis.

b. Isu Nasional

1. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif pada situasi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. COVID-19 memberikan tekanan negatif



terhadap ekonomi nasional, akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Ekonomi Indonesia tumbuh sangat lambat pada Tahun 2021. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 diprediksi tumbuh pada kisaran 3,9 persen. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan akan meningkat dari 14,43 persen tahun 2019 diprediksi menjadi 15,0-15,4 persen di tahun 2021. Arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat dan terukur menjadi instrumen pelaksanaan perencanaan pembangunan agar pencapaian target kinerja dapat teralisasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai terkoreksi cukup dalam di tahun 2021 sebagai dampak COVID-19. Sektor-sektor yang diprediksi produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap totalitas produktivitas daerah belum maksimal dalam membangun postur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 dan Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro secara nasional sebagai respon terhadap pencegahan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Sektor perdagangan, pertanian/perkebunan, transportasi dan industri pengolahan (UMKM) menjadi sektor yang harus menyesuaikan/membatasi ruang gerak terhadap kondisi ini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga akhir tahun 2020 melambat 2,5 persen. Tren perlambatan ini juga searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan ditingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, jika pandemi COVID-19 sudah selesai maka fokus pembangunan pada *recovery* ekonomi masyarakat dengan fokus pada pembaharuan sistem kesehatan dan revitalisasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan investasi yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9 persen. Dari tahun 2016 pendapatan perkapita mengalami tren peningkatan. Untuk total pendapatan perkapita tahun 2020 sebagai dampak COVID-19



diperkirakan sebesar 52,04 juta/kapita/tahun dan pada tahun 2021 sebesar 54,21 juta/kapita/tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan dari 5,26 persen di tahun 2018 menjadi 3,75 persen di tahun 2019 dan 3,12 persen di tahun 2020 dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 4,17 persen.

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama sebagai dampak COVID-19 terus dilakukan. Bentuk bantuan tunai yang berasal dari pemerintah (Kemensos), Program Sembako sebanyak 6.045 KK, Program Keluarga Harapan sekitar 4.930 KK. Begitu juga stimulus usaha bagi pelaku UMKM juga menjadi perhatian terutama pada akses layanan keuangan (kredit) melalui perbankan baik itu relaksasi kredit dan pemberian suku bunga minimal untuk usaha mikro kecil.

Untuk penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Secara nasional target pengentasan kemiskinan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 9,22 persen di tahun 2019 menjadi 9,7-10,2 persen di tahun 2020, lalu dengan intervensi melalui kebijakan pengentasan kemiskinan diharapkan tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan menjadi 9,2-9,7 persen di tahun 2021. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, tingkat kemiskinan tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 14,43 tahun 2019 menjadi 15,56 persen pada tahun 2020. Lalu melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pada tahun 2021 diharapkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 15,00 persen.

2. Industri 4.0

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan memasuki industri 4.0 turut menjadi perhatian. Kemampuan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi dan infrastruktur telekomunikasi menjadi indikator kematangan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era industri 4.0.

Kekhawatiran tersebut tidaklah tanpa alasan, sebab sektor industri di Indonesia masih belum mendekati Industri 4.0, contoh saja pada industri agraris, masih ada petani menggunakan cangkul, walaupun beberapa daerah petaninya sudah memasuki



Industri 4.0, tidak semua petani menguasai komputer/gadget, selain itu, masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki SDM memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan SDM rendah dan kemungkinan meningkatkan angka pengangguran.

Industri 4.0 akan membawa perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beberapa perubahan yang harus disiapkan antara lain, Pertama: *Internet of Thing (IoT)*, sebuah konsep dimana suatu obyek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Aktivitas dan tata kelola pemerintahan telah melakukan ini dalam proses *procurement*, distribusi dan logistik yang semua diatur oleh teknologi berbasis data. Proses seleksi vendor/penyedia dalam *procurement* sudah tidak memerlukan interaksi manusia lagi. Kedua: *Artificial Intelligence*, jika *internet of thing* menjadi suatu *habit* maka data data akan banyak terkumpul. Kumpulan-kumpulan data inilah yang selanjutnya oleh komputer atau mesin dipelajari dan diolah secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula *Artificial Intelligence AI* dalam membuat prediksi. Dengan *Artificial Intelligence* akan semakin mudah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan proses produksi. Ketiga: *System Integration*. Sistem integrasi atau *integrated system* merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen sub sistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. *Integrated system* sangat penting dalam mengintegrasikan proses *design*, proses *budgeting*, *prototyping*, *material and strategic planning*, dan *manufacturing processing*.

Perubahan kebutuhan (*needs*) dari konsumen yang cepat dan persaingan dari competitor yang ketat mengharuskan seluruh sistem bergerak dengan cepat dan terjal secara sinambung. Keempat: *Cyber security dan Big Data*. Persaingan yang ketat menjadikan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi suatu keharusan. Informasi dan data yang disimpan harus



dilindungi dalam *big data*. *Big data* adalah seluruh informasi yang tersimpan di *cloud computing*.

Revolusi Industri 4.0 memungkinkan produktivitas dan efisiensi sumber daya yang lebih tinggi. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang tepat untuk produksi yang sifatnya berkelanjutan dan efisien.

3. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) memiliki suatu pola yang mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) dengan cara membentuk sistem perdagangan yang bebas/*free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Seluruh anggota ASEAN pun telah menyepakati perjanjian tersebut, termasuk Indonesia. MEA adalah istilah dari Indonesia, istilah internasionalnya adalah AEC atau *Asean Economic Community*. MEA dibentuk dilandaskan pada empat pilar, yaitu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi; menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang; menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif; dan integrasi ke ekonomi global.

Bentuk kerjasama MEA diantaranya adalah, pengembangan pada sumber daya manusia (SDM) dan adanya peningkatan kapasitas, konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi, memiliki langkah langkah dalam pembiayaan perdagangan, meningkatkan infrastruktur, meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA, dan pengakuan terkait kualifikasi profesional.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi nasional dan daerah.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi langsung luar negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi,



penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Namun disisi lain MEA juga memiliki dampak negatif, dampak negatif tersebut terjadi di berbagai sisi, diantaranya adalah pada sisi kompetisi yaitu pada muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk produk luar negeri yang lebih berkualitas. Pada sisi eksploitasi, eksploitasi dengan skala besar terhadap ketersediaan SDA (Sumber Daya Alam) oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah SDA yang melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada sisi ketenagakerjaan, produktivitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut, akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat.

4. RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 menetapkan visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang dijabarkan kedalam 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;**
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**



9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per Tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan Indonesia 2045 telah ditetapkan 5 arahan pembangunan. Kelima arahan tersebut adalah:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.



d. Penyederhanaan Birokrasi.

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional 2020-2024 direncanakan dan dijalankan dalam rumusan 7 agenda pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan**
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.**

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.



Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan
- c. Iklim; dan
- d. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;



- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada Tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima Tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Perekonomian nasional dalam kurun waktu lima Tahun ke depan diarahkan agar tumbuh lebih cepat di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Pergeseran perekonomian ditandai dengan bergesernya porsi (share) perekonomian secara nominal sebesar 1,1 persen ke luar Pulau Jawa dan Sumatera. Angka pergeseran ini telah mempertimbangkan kemampuan wilayah yang berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dari Pulau Jawa dan Sumatera. Momentum pertumbuhan Pulau Sumatera tetap dijaga dan didorong akan melebihi tingkat pertumbuhan Pulau Jawa.

Kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan potensi pariwisata, perkuatan infrastruktur konektivitas antarwilayah menjadi kunci percepatan pertumbuhan Pulau Sumatera. Dalam lima Tahun ke depan (2020-2024),



pembangunan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

5. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis pembangunan tahun rencana tentunya diangkat dengan mempedomani dan merujuk dari permasalahan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dan isu pembangunan yang telah dilihat dalam jangka menengah melalui RPJMD. Berbagai isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan antara lain :

- 1. Masih adanya konflik teritorial antara masyarakat dengan pemerintah terutama soal penunjukan wilayah/kawasan menjadi kawasan hutan oleh negara, dimana wilayah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan persoalan, salah satunya pengembangan wilayah dan pembangunan.**
- 2. Masih banyak kawasan pemukiman yang berada di kawasan pesisir pantai sehingga rawan tsunami dan gelombang pasang. Begitu juga penataan wilayah pesisir pantai yang sulit selain rapat, kumuh dan sampah dibuang ke laut sehingga mencemari lingkungan. Wilayah lain sekitaran aliran sungai yang sering terkena seperti di Siberut dan beberapa wilayah lain. Potensi ancaman banjir, gelombang pasang, tsunami harus diatasi dengan merelokasi dan menata kawasan permukiman secara efektif dan efisien. Mengatasi abrasi pantai dengan tanggul tidak cukup efektif dan memakan biaya yang sangat besar apalagi jika dialokasikan melalui APBD.**
- 3. Dampak penanganan COVID-19, yang belum dapat dipastikan kapan pandemi ini berakhir, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif guna memberikan perlindungan dan menahan gejolak akibat yang ditimbulkannya.**
- 4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.**

Indikator dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian kinerja beberapa aspek antara lain rata-rata lama sekolah sebesar 7,08 tahun (tamatan SD/ sederajat), angka harapan hidup sebesar 64,68 tahun (di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional), Indeks Pembangunan Manusia



(IPM) sebesar 61,28 persen (di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional).

5. Masih tingginya persentase penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 sebesar 14,43 persen atau sekitar 13.200 jiwa.

6. Memiliki potensi pengembangan pariwisata yang besar tetapi belum terkelola dengan baik.

Masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 0,77 persen.

7. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat, ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,34 persen.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi kesejahteraan masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Tahun 2021 merupakan Tahun kelima atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Tahun 2021 ini merupakan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada Tahun dimaksud.

2.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

2.2 Misi

Dalam mewujudkan visi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif.**
- 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.**



- 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim.**
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani.**
- 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya**

2. 3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator atau ukuran keberhasilan.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

Tujuan:

- 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.**

**Indikator capaian: Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Persentase Penduduk Miskin**

Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan:

- 1. Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur publik yang berkualitas.**

Indikator capaian: Persentase ketersediaan infrastruktur publik (jalan/jembatan, air bersih) dalam kondisi baik

- 2. Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.**

Indikator capaian: persentase permukiman layak huni



3. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Indikator capaian: indeks kualitas lingkungan hidup

Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim

Tujuan:

1. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas

Indikator capaian: Pertumbuhan ekonomi

2. Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kuat

Indikator capaian: Pendapatan perkapita

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani

Tujuan:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

Indikator capaian: Indeks RB

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Indikator capaian: WBK/WBBM

Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Tujuan:

1. Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Indikator capaian: Indeks Pembangunan Kebudayaan

2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis

Indikator capaian: Tingkat kriminalitas.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3.1
Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

VISI: Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif	1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1 Meningkatkan pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		2 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
		3 Meningkatkan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) sumber daya manusia
3. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur publik yang berkualitas	1 Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas
		2 Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		3 Optimalisasi pengendalian daya rusak air
		4 Meningkatkan pemanfaatan penataan ruang wilayah
		5 Meningkatkan penyelenggaraan transportasi
		6 Meningkatkan kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		7 Meningkatkan ratio elektrifikasi dengan pembaruan energi
	2 Terpenuhi kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	1 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
	3 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1 Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih
		2 Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan drainase) berwawasan lingkungan
		3 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		4 Meningkatkan integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
3 Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim	1 Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	1 Meningkatkan pemerataan pendapatan
	2 Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kuat	1 Meningkatkan kesempatan kerja
		2 Terkendalinya inflasi daerah
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani	1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
5. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berbudaya	1 Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
	2 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	2 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender



Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.2
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2017-2022

2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas	Menuju Universal Akses 1000 100	Penanganan dan Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19 melalui Upaya Kesehatan dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Penanganan dan Penanggulungan Dampak COVID-19 dengan Peningkatan Kualitas Sistem Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Masyarakat yang Terintegrasi

Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mampu merefleksikan tujuan strategis kepala daerah dalam 5 (lima) tahun. Perumusan strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah pada perubahan RPJMD disusun berdasarkan analisa hasil evaluasi pencapaian pembangunan (3 tahun). Begitu juga telah menyesuaikan proyeksi kondisi sosial, ekonomi masyarakat sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Kepulauan Mentawai.

Secara makro, struktur perekonomian yang bertumpu pada sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan) sangat membantu dalam memitigasi dan



memiliki daya tahan ekonomi yang cukup untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 di Kepulauan Mentawai.

Tujuan pembangunan daerah didefinisikan dalam bentuk strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan kegiatan. Bila bersifat makro maka dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, yang bersifat mikro maka akan didefinisikan dalam bentuk program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Prioritas pembangunan jangka menengah daerah antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah guru mencukupi, kualitas guru meningkat, dan beasiswa pendidikan perguruan tinggi;

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah terutama dalam penanggulangan penyakit/wabah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, perbaikan gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat diterapkan, penanganan intensif bagi bayi balita dan ibu melahirkan, peningkatan pelayanan puskesmas, pembentukan BLUD RSUD;

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

Pembangunan jalan mantap merupakan program pada prioritas ini. Pembangunan jalan trans Mentawai sepanjang 393,2 km, pembangunan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan trans Mentawai secara bertahap diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi Jalan Nasional, jalan provinsi menghubungkan konektivitas antar pulau dan konektivitas ke luar Mentawai,



membangun pelabuhan penyeberangan dan Fasilitas pengembangan Bandara Rokot dan Bandara Peipei, mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet ke semua pelosok Mentawai, pembangunan jaringan irigasi;

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pemukiman Tersedianya air bersih, saluran drainase, pengendalian limbah dan persampahan, tersedianya rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendorong relokasi pemukiman kumuh, dan rawan bencana, membangun drainase untuk pengendalian banjir serta pembuangan limbah rumah tangga, mengupayakan Area Penggunaan Lainnya (APL) lebih optimal, melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat;

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan agribisnis maupun agroindustri (ekonomi kerakyatan), peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan perluasan pemasaran, pengembangan kawasan pertanian terpadu untuk pengembangan cengkeh, pisang, kepala dan sagu, fasilitas Sentra Kelautan Perikanan Terpadu;

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal;

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausahawan muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran;



8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

Prioritas ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai dengan melakukan bauran energi, penguatan kinerja PLTBM, fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN;

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat; dan

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, menata kembali struktur pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penataan pegawai honor.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022 beserta perubahannya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Belanja Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	%	61,10
		Persentase Penduduk Miskin	%	14,60%
2.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,10
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,9
3.	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	indeks	0,55
		Angka Harapan Hidup	Tahun	64,70
		Prevalensi Stunting	%	31
4.	Meningkatnya keterampilan hidup (Life skill) sumber daya manusia	Persentase wirausaha yang tumbuh	%	1,5
5.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas	Persentase ketersediaan infrastruktur publik (jalan, jembatan, air bersih) dalam kondisi baik	%	9
6.	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	%	11,00
7.	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase pemanfaatan sumber air baku	%	65
8.	Optimalisasi pengendalian daya rusak air	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	%	62
9.	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya luas RTH minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	%	100
10.	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi	Cakupan layanan transportasi	%	83
11.	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	65
12.	Meningkatnya ratio elektrifikasi dengan pembaruan energi	Rasio Elektrifikasi	%	85
13.	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	Persentase permukiman layak huni	%	40
14.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	%	73
15.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup		>80
16.	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	Persentase Rumah tangga dengan akses air bersih layak	%	43
17.	Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan	Rata-rata capaian rumah tangga bersanitasi layak	%	47



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Target
	drainase) berwawasan lingkungan	(limbah, sampah, drainase)		
18	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah STBM	desa	3
19	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	indeks	sedang
20	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	%	3,5
21	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	indeks	0,33
22	Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kuat	Pendapatan per kapita	juta/ kapita/ tahun	51.81
23	Meningkatnya kesempatan kerja	Nilai investasi	Miliar Rp	150
		Tingkat pengangguran terbuka	%	3,50
24	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat inflasi	%	3,90
25	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks RB	kategori	B
26	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85
27	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	WBK/WBBM	OPD	3 OPD
28	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK	opini	WTP
		Nilai SAKIP	nilai	B
29	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	51,13
30	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	5 MHA
31	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	%	3
32	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan Gender	Tingkat Kabupaten Layak Anak	tingkat	madya
		Indeks Pembangunan Gender	%	89,68

2.5 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah



daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Dari indikator kinerja (*outcome*) kita bisa melihat realisasi capaian kinerja program dan kinerja pendanaan.

Aspek pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi lainnya. Urusan wajib terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sementara urusan wajib non pelayanan dasar meliputi aspek tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil



dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pilihan terdiri dari aspek pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, perikanan, sedangkan fungsi lainnya nya terdiri dari aspek perencanaan pembangunan, penelitian, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, pengawasan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, digambarkan indikator kinerja daerah sebagai berikut:



Tabel 2.5.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2022

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01%	5,01%	5,07%	5,13%	2,0%	3,5%	4,3%
2	Laju inflasi (%)	4,81%	4,25%	4,66%	3,19%	3,95%	3,9%	3,82%
3	PDRB per kapita (Rp.juta)	42,79 jt/kapita	45,12 jt/kapita	46,2 jt/kapita	50,46 jt/kapita	51 jt/kapita	51,81 jt/kapita	52.42 jt/kapita
4	Indeks Gini	0,306	0,32	0,3	0,34	0,342	0,33	0,30
5	Persentase penduduk miskin (%)	15,12%	14,67%	14,44%	14,43%	15,50%	15,0%	14,50%
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	58,27	59,25	60,28	61,26	61,05	61,10	61,30
7	Rata lama sekolah (tahun)	6,27 tahun	6,69 tahun	6,95 tahun	7,08 tahun	7,08 tahun	7,10 tahun	7,3 tahun
8	Angka harapan hidup (tahun)	64,36 tahun	64,37 tahun	64,49 tahun	64,68 tahun	64,70 tahun	64,75 tahun	64,80 tahun
9	Angka Melek Huruf	93,70%	96,47%	96,47%	95,51%	99,52%	99,53%	99,58%
10	Tingkat pengangguran terbuka	1,25%	1,96%	2,0%	2,27%	4,00%	3,50%	3,25%
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	-	72,61	71,52	80	85	85
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	APK PAUD	20%	67,58%	83,28%	76,51%	77,00%	78,0%	78,0%
	APK SD	111%	116,95%	127,06%	117,40%	100%	100%	100%
	APK SMP	79,73%	85,44%	73,07%	84,64%	84,80%	85,0%	85,0%
	APM SD /MI/ paket A	98,30%	98,82%	99,48%	99,68%	100%	100%	100%
	APM SMP SMP /MTS/ Paket B	59,19%	61,1%	60,53%	60,64%	60,65%	60,7%	60,7%
	Persentase kelulusan kesetaraan	0%				100%	100%	100%
	Rata-rata Mapel Asesmen Nasional SD = 7	0%				100%	100%	100%
	Rata-rata Mapel Asesmen Nasional SMP = 7	0%				100%	100%	100%
	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	-				100%	100%	100%
	Huruf Persentase sekolah akurat dapodik					90%	100%	100%
	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	0%				1,00%	1,5%	2%
	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	74,19%				100%	100%	100%
	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	80%				100%	100%	100%
	Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	18,72%				20%	22%	25%
	Angka Melek Huruf	93,70%				99,52	99,53	99,58
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	70%	80%	83,67%	78,88%	68,88%	70%	70%
	Cakupan Desa UCI	51%	60%	62,79%	67,91%	67%	72%	76%
	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	27 /1000 KH	19 /1000 KH	22,6 /1000 KH	24,8 /1000 KH	25,5 /1000 KH	25 /1000 KH	24 /1000 KH
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	442 / 100rb KH	328 / 100rb KH	332/ 100rb KH	192/ 100rb KH	343/ 100rb KH	325/ 100rb KH	306/ 100rb KH
	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	4,75%	8,2%	6,3%	3,6%	1,1%	0,91%	0,35%
	Angka Morbiditas	17,16%				15,15%	15%	14,80%
	Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	-	C	B	B
	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	4 puskesmas	4 puskesmas	7 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	12 puskesmas	12 puskesmas
	Rata-rata lama pasien dirawat	9 Hari	8 Hari	7 Hari	7 Hari	6 Hari	6 Hari	5 Hari
	Jumlah Desa dengan PHBS	0 desa	-	-	-	5 desa	15 desa	30 desa
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Jalan Mantap	5,97%	5%	5,8%	5,79%	6%	6,5%	7%
	Persentase Penyedia Jasa yang Memiliki Tenaga Kerja Konstruksi Terampil Bersertifikat	-				2%	2%	3%
	Persentase pemanfaatan Sumber Air Baku untuk air bersih	7,00%				15%	16%	17%
	Cakupan jaringan irigasi	442 ha	687,77	186 ha	11,16 ha	19 ha	21 ha	23 ha
	Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	2.3%	4,3%	17,45%	0,12%	5,3%	6,3%	7,3%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	Ketaatan terhadap RTRW	10%	100%	100%	100%	30%	35%	40%
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1%	3,2%	4,12%	0,46%	5%	6%	7%
	Persentasi gedung pemerintah yang siap pakai	0%				100%	100%	100%
	Persentase Sistem Pengelolaan air minum dalam keadaan baik (debit air stabil = 9 ltr/dtk)	60%				80%	85%	90%
	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	20%				40%	45%	50%
	Persentase lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	10%				20%	25%	30%
	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	40%				60%	65%	70%
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	3%				8%	10%	12%
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	50%				59%	55%	50%
	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	20%				59%	60%	62%
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN							



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Persentase Penegakan PERDA	40%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase bencana tertangani	65%				100%	100%	100%
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>) Penanggulangan Bencana	-				20 Menit	15 Menit	15 Menit
	Persentase kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	100%				100%	100%	100%
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
	Persentase penurunan PMKS	18,91%	43,26%	34%	91,2%	91,3%	91,4%	92%
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60%	100%	52%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100%				100%	100%	100%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
	Persentase Tenaga Kerja dilatih yang telah bekerja	0%	8%	16%	0%	16%	18%	20%
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1%				0%	1%	1,5%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	Target
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera					9%	36%	36%
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	45%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemenuhan hak anak	-				100%	100%	100%
	Kecamatan layak Anak	-				4 kec	5 kec	5 kec
	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	-				100%	100%	100%
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
	Skor Indeks Ketahanan Pangan	-				52	55	58
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
	Persentase Luas lahan negara Bersertifikat	2%	5%	0%	0%	5%	8%	10%
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase Sampah yang dikelola	0%				5%	6%	7%
	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%				100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	luas kawasan perlindungan setempat yang dikonservasi	0 Ha				300 ha	350 ha	400 ha
	Persentase pembangunan sesuai dengan peruntukkan ruang	100%				100%	100%	100%
	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	0 MHA	1 MHA	1 MHA	4 MHA	4 MHA	5 MHA	5 MHA
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	63%	86,07%	96%	98,92%	99%	99,10%	99,20%
	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	45,63%	89,56%	85%	89,44	90%	90,10%	91%
	Persentase data kependudukan yang valid dan update	24,42%				80%	82%	82%
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	Persentase Desa dengan penyusunan perencanaan dengan tepat waktu	0%				85%	90%	92%
	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	0%				88%	90%	92%
	Persentase BUM des yang mandiri	0%				1%	1,50%	2%
	Desa tertinggal	20 Desa				16 Desa	15 Desa	13 Desa
	Desa Maju	3 desa				6 Desa	7 Desa	8 Desa



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	0 Lembaga				2 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Rasio Akseptor KB	53,23%	61,40%	54,96%	58%	58,06%	59%	60%
	Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera					2,00%	3%	3%
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
	Persentase armada angkutan laik jalan/layar					70%	80%	85%
	Jumlah orang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	101.235 kali	234.839 kali	135.144 kali	283.921 kali	141.961 kali	286.760 kali	315.436 kali
	Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	87.456 ton	232.917 ton	600.850 ton	632.135 ton	316.068 ton	638.456 ton	702.302 ton
	Jumlah orang melalui bandara per tahun	80 orang				100 orang	105 orang	110 orang
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN							
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap media informasi publik	-				75%	80%	85%
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE	0%				10%	20%	30%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
	Cakupan bina kelompok UKM Produktif (Modal diatas 50 jt)	10%				30%	35%	40%
	Persentase usaha non formal beralih ke usaha fomal (mikro/kecil)	0%				1%	2%	3%
	Pertumbuhan koperasi	1%				1%	1,80%	2%
	Persentase Koperasi aktif	35,88%	18%	30,12%	25,88%	38%	40%	50%
	Persentase koperasi sehat	5%				5%	7%	10%
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	1%				1%	1,50%	2%
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
	Persepsi kemudahan berinvestasi	-				70	75	78
	Jumlah rencana investasi	-				3 MoU	5 MoU	6 MoU
	Rata-rata lama Pengurusan izin investasi	10 Hari				7 hari	6 hari	5 hari
	Pertumbuhan realisasi investasi	0 persen				0,50 persen	1 persen	2 persen
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	5 organisasi	6 organisasi	10 organisasi	9 organisasi	9 organisasi	10 organisasi	11 organisasi
	Jumlah Prestasi olahraga	8 cabang olahraga	12 cabang olahraga	16 cabang olahraga	10 cabang olahraga	7 cabang olahraga	9 cabang olahraga	10 cabang olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	60%	63%	65%	68%	75%	80%	90%
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	Jumlah Perangkat daerah yang menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi	0 OPD				36 OPD	36 OPD	36 OPD
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
	Persentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	-				50%	60%	60%
	Jumlah sanggar yang dibina	0 Sanggar				4 sanggar	4 sanggar	4 sanggar
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
	Persentase Perpustakaan yang sesuai dengan SN Perpustakaan	0 persen				4%	5%	5%
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	5%	1%	1%	12%	10%	12%	14%
	Persentase Kualitas dan kuantitas khsanah kearsipan		10%	20%	40%	50%	60%	60%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tangkap	6.920 ton	7.235 ton	7.055 ton	7.270 ton	8.000 ton	9.500 ton	10.000 ton



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	476 ton				150 ton	500 ton	600 ton
	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	5%				10%	15%	20%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
	Jumlah wisatawan mancanegara	7.982 orang	10.053 orang	20.000 orang	9.164 orang	2.500 orang	10.000 orang	12.000 orang
	jumlah wisatawan domestik	685.000 orang	700.300 orang	700.500 orang	989.906 orang	100.000 orang	700.000 orang	720.000 orang
	PAD sektor pariwisata	4 miliar	7,044 miliar	8,147 miliar	7,894 miliar	2 miliar	9 miliar	11 miliar
	Lama kunjungan wisata	10 hari	7 hari	14 hari	7 hari	6 hari	7 hari	7 hari
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	60%				70%	80%	85%
	Produktivitas Pertanian dan Peternakan							
	pisang	25.693 kwintal	1.199 kwintal	3.311 kwintal	449.380 kwintal	525.000 kwintal	675.000 kwintal	825.000 kwintal
	cengkeh	1.506 ton	1.519 ton	1.524 ton	1.539 ton	2.200 ton	2.300 ton	2.500 ton
	keladi	10.760 kwintal	97.730 kwintal	1.155 kwintal	13.260 kwintal	13.500 kwintal	15.000 kwintal	16.000 kwintal
	kelapa	6.495 ton	9.346 ton	15.113 ton	15.288 ton	16.000 ton	18.000 ton	20.000 ton
	Sagu	918 ton	1.847 ton	958 ton	947 ton	950 ton	1.000 ton	1.200 ton
	Sapi	1.315 ekor	1.500 ekor	1.800 ekor	2.050 ekor	2.500 ekor	2.800 ekor	3.100 ekor



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	Babi	29.700 ekor	30.487 ekor	27.598 ekor	24.918 ekor	10.730 ekor	25.760 ekor	28.790 ekor
	Unggas	44.000 ekor	52.500 ekor	48.000 ekor	53.000 ekor	55.000 ekor	70.000 ekor	80.000 ekor
	Persentase Bina kelompok Tani yang produktif	10%				20%	30%	40%
	Penyakit Hewan yang tertangani	100%				100%	100%	100%
	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%				100%	100%	100%
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
	Pertumbuhan Nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	1%				2,50%	2,80%	3%
	Pertumbuhan usaha perdagangan	5%				9%	9%	10%
	Realisasi Retribusi Pasar	60%				85%	90%	95%
	Persentase ketaatan usaha dagang tertib niaga	80%				80%	85%	90%
	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu					<9%	<8%	<7%
	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar wilayah					<15%	<12%	<11%
	Persentase Usaha Dagang Tertib Ukur	70%				75%	80%	85%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) industri	5%				15%	20%	25%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	Target
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							
	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun litigasi	60%				82%	85%	88%
	Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	7%				5%	3%	2%
	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	80%				90%	93%	95%
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	8%				20%	25%	30%
	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	60%				75%	80%	80%
	Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	70%				90	90	90
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
	Tingkat kehadiran Pimpinan dan anggota DPRD	80%				75%	80%	80%
	Persentase Pertemuan dengar pendapat yang ditindaklanjuti	10%				20%	22%	25%
	Persentase Ranperda yang disetujui	70%				75%	80%	80%
	Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	7 hari				7 hari	5 hari	4 hari



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022 Target
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
	persentase usulan masyarakat melalui reses/monev menjadi pokok pikiran DPRD	-				60%	70%	80%
	Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	-				70%	72%	75%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							
	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Konsistensi Program RPJMD kedalam Renstra OPD	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Konsistensi Program RKPd kedalam Renja OPD	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02	KEUANGAN							
	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	60%	67,8	21,43	66,75	90%	95%	100%
	Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	61%				70%	75%	80%
	Persentase PAD terhadap total pendapatan	4,61%				5%	8%	8,50%
5.03	KEPEGAWAIAN							
	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	80%				100%	100%	100%
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat jabatan	30%				100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	0%	8	25	1	1%	2%	1,8%
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
	Persentase tindak lanjut temuan	20%	45	65	78	80%	80%	80%
	Penurunan temuan BPK	20%	45	69	71	80%	90%	100%
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP					80%	85%	85%
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan							
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	-				B	B	B
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	-				B	B	B
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	-				B	B	B
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	-				B	B	B
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	Persentase ormas aktif	-				60%	65%	70%
	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	-				90%	100%	100%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Realisasi Capaian			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	Target
	potensi gangguan keamanan yang tertangani	-				100%	100%	100%
	persentase konflik sosial tertangani	-				90%	100%	100%
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	-				68%	70%	75%
	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100	100	100	100%	100%	100%
	Persentase IKM Perangkat daerah kategori baik	-				B	B	B
	Persentase LKjIP OPD Kategori baik	40%				50%	60%	65%
	Tingkat kehadiran Pimpinan dan anggota DPRD	80%				80%	85%	85%
	Persentase Pertemuan dengan pendapat yang ditindaklanjuti	10%				20%	22%	25%
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	90	91	92	93	94	95	96
2	Angka kriminalitas (%)	3,54 %	3,54%	0,068%	0,061%	3,1%	3,0%	2,5%
3	Rasio ketergantungan (%)	63.9%	63,5%	63,2%	62,91%	62,5%	62,3%	62,0%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 disusun untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran berupa pelaksanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah disertai dengan sumber daya, faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja maupun faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan kinerja dengan kriteria target kinerja sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja nya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

yang disesuaikan dengan dokumen perubahan RPJMD. Hasil pengukuran pencapaian dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) sasaran strategis dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja sasaran strategis serta 171 (seratus tujuh puluh satu) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan.

3.3 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Sebagai pertanggungjawaban dari perjanjian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Bab II, maka disajikan realisasi capaian kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Tahun 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Tahun 2020.

Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini.

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

Tujuan 1.1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas diukur melalui indeks pembangunan manusia dan persentase penduduk miskin, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

No	Tujuan	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	%	61,09	61,10	61,35	100,40
		Persentase Penduduk Miskin	%	14,35	14,60	14,84	98,38
Rata-Rata Capaian Kinerja							99,39

Dari tabel pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah 99,38%. Indikator indeks pembangunan manusia sebesar 61,35% (Data BPS) dan indikator persentase penduduk miskin belum mencapai target yaitu 14,84%. Dan secara keseluruhan capaian kinerja untuk tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Sasaran 1.1.1: Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan

Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.2
Meningkatnya Pemerataan, Perluasan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
1.1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7,10	7,2	101,4
		Harapan Lama sekolah	Tahun	12,82	12,9	12,89	99,92
Rata-Rata Capaian Kinerja							100,66

Dari tabel pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah 100,66%. Indikator rata-rata lama sekolah mencapai 7,2 tahun, artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,2 tahun atau telah menamatkan kelas VII. Sedangkan indikator Harapan Lama Sekolah mencapai 12,89 tahun, artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,89 tahun atau setara Diploma I. dan secara keseluruhan capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2021 dengan tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Kondisi ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yakni Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) yang diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah guru mencukupi, kualitas guru meningkat, dan beasiswa pendidikan perguruan tinggi.

Sasaran 1.1.2: Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan

Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan diukur melalui Rata-Rata Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Angka Harapan Hidup, dan Prevalensi Stunting sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.3
Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	%	indeks	0,55	0,52	94,54
		Angka Harapan Hidup	Tahun	69,47	64,75	64,73	99,96
		Prevalensi stunting	%	19,30	31	27	87,09
Rata-Rata Capaian Kinerja							93,86

Dari tabel pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran di atas, seperti tahun sebelumnya terdapat 1 (satu) indikator yakni indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang masih berdasarkan data Kemenkes Tahun 2018. Sedangkan dari indikator angka harapan hidup dan indikator prevalensi *stunting* diperoleh realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 93,86%.

Sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022, pada Tahun 2021 tetap diarahkan pada Penanganan dan Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19 melalui Upaya Kesehatan dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi, maka secara keseluruhan capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya akses dan mutu

layanan kesehatan Tahun 2021 dengan tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas sudah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian ini juga merupakan upaya pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yakni Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) yang diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah terutama dalam penanggulangan penyakit/wabah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, perbaikan gizi masyarakat serta penerapan pola hidup bersih dan sehat, penanganan intensif bagi bayi balita dan ibu melahirkan, peningkatan pelayanan puskesmas, dan pembentukan BLUD RSUD.

Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Keterampilan Hidup (*Lifeskill*) Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Keterampilan Hidup (*Lifeskill*) Sumber Daya Manusia diukur melalui Persentase Wirausaha yang Tumbuh sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.4
Meningkatnya Keterampilan Hidup (*lifeskill*) Sumber Daya Manusia

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
1.1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (<i>lifeskill</i>) sumber daya manusia	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	%	0,5	1,50	21,73	1448,6

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 1448,6%. Indikator persentase wirausaha yang tumbuh mencapai 21,73%, yang menunjukkan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada Tahun ini berhasil dicapai atau dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.



Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan 2.1: Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur publik yang berkualitas.

Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur publik yang berkualitas diukur melalui Persentase ketersediaan infrastruktur publik (jalan/jembatan, air bersih) dalam kondisi baik, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.5
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Berkualitas

No	Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1	Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur publik yang berkualitas	Persentase ketersediaan infrastruktur publik (jalan/ jembatan, air bersih) dalam kondisi baik	%	7	9	12,72	141,33

Kendati belum sesuai target, dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 141,33 persen. Indikator persentase ketersediaan infrastruktur publik (jalan/jembatan, air bersih) dalam kondisi baik mencapai 12,72%, yang berarti bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini dapat dicapai dengan realisasi kinerja sangat tinggi.

Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas.

Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas diukur melalui Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam) sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.6
Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	%	24,05	11	12,7	115,45

Dari pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 115,45%. Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang ($>40\text{km/jam}$) mencapai 12,7%, yang berarti bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil **dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi**.

Sasaran 2.1.2: Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Air diukur melalui Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.7
Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	%	60	65	50	76,92

Dari pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 76,92%. Indikator persentase pemanfaatan sumber air baku berarti bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini dapat **dicapai dengan realisasi kinerja tinggi**.

Sasaran 2.1.3: Optimalisasi Pengendalian Daya Rusak Air.

Optimalisasi Pengendalian Daya Rusak Air diukur melalui Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.8
Optimalisasi Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.3	Optimalisasi Pengendalian daya rusak air	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	%	60	62	50	80,64

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 80,64%. Indikator persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air mencapai 50%, yang berarti bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun hanya dapat dicapai dengan realisasi kinerja masih rendah.

Sasaran 2.1.4: Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang Wilayah.

Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang Wilayah diukur melalui Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.9
Meningkatnya Pemanfaatan Penataan Ruang Wilayah

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.4	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	%	100	100	100	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 100%. Indikator persentase tercapainya luas RTH minimal 32% terhadap luas wilayah perkotaan mencapai 100%, yang berarti bahwa Tahun 2021 sasaran meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah berhasil melampaui target yang ditetapkan atau dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Sasaran 2.1.5: Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi.

Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi diukur melalui Cakupan Layanan Transportasi sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.10
Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	%	35	83	83	100

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 100%. Indikator cakupan layanan transportasi mencapai 83%, yang berarti bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya penyelenggaraan transportasi Tahun 2021 dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Sasaran 2.1.6: Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika.

Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika diukur melalui Cakupan Layanan Telekomunikasi sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.11
Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.6	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	86	65	85	130,76

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 130,76%. Indikator cakupan layanan telekomunikasi mencapai 85%, yang berarti bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan baik. Dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Tahun 2021 dengan tujuan Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur publik yang berkualitas **dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi**. Di Tahun 2021, Cakupan layanan Telekomunikasi dimaksud terdiri dari:

1. Layanan Telepon Seluler

- *Desa yang terlayani* meliputi 18 desa yang terdiri dari : 1 desa di Kecamatan Pagai Utara, 5 desa di Kecamatan Sipora Selatan, 2 desa di Kecamatan Siberut Utara, 3 desa di Kecamatan Siberut Barat, 1 desa di Kecamatan Siberut Barat



Daya, 3 desa di Kecamatan Siberut Tengah, dan 3 desa di Kecamatan Sipora Utara.

- *Desa yang belum terlayani* meliputi: 1 desa di Kecamatan Pagai Utara, 1 desa di Kecamatan Siberut Selatan, 4 desa di Kecamatan Siberut Utara, 1 desa di Kecamatan Siberut Barat, 1 desa di Kecamatan Sikakap, dan 2 desa di Kecamatan Pagai Selatan.

2. BTS

Di Tahun 2021 terdapat penambahan 38 BTS, sehingga jumlah keseluruhan BTS sudah mencapai 81 BTS dengan sebaran : 5 desa di Kecamatan Pagai Utara, 6 desa di Kecamatan Sipora Selatan, 2 desa di Kecamatan Siberut Selatan, 5 desa di Kecamatan Siberut Utara, 9 desa di Kecamatan Siberut Barat, 4 desa di Kecamatan Sipora Utara, 2 desa di Kecamatan Sikakap, dan 5 desa di Kecamatan Pagai Selatan.

3. Provider

Provider yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih 1 provider, yang sudah terpasang 10 tower, dengan sebaran masing masing 1 provider di tiap kecamatan

4. Layanan Internet

Di tahun 2021 Dinas Kominfo memperluas layanan internet di 112 desa yang terdiri dari : 3 desa di Kecamatan Pagai Utara, 17 desa di Kecamatan Sipora Selatan, 12 desa di Kecamatan Siberut Selatan, 14 desa di Kecamatan Siberut Utara, 10 desa di Kecamatan Siberut Barat, 8 desa di Kecamatan Siberut Barat Daya, 7 desa di Kecamatan Siberut Tengah, 12 desa di Kecamatan Sipora Utara, 11 desa di Kecamatan Sikakap dan 18 desa di Kecamatan Pagai Selatan.

5. Kantor Pos

Kantor Pos terdapat di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Selatan dan Kecamatan Siberut Utara.

6. Layanan Media Elektronik

Media Elektronik terdiri Stasiun Radio Pemerintah sebanyak 1 stasiun dan Stasiun Radio Swasta sebanyak 2 stasiun yang sudah terjaangkau di 5 Kecamatan.

7. Media Cetak

Untuk surat kabar nasional, baru 2 kecamatan yang terlayani dan 8 kecamatan yang belum terlayani. Untuk surat kabar lokal, sudah dapat dinikmati di 10 kecamatan.

Sasaran 2.1.7: Meningkatnya Ratio Elektrifikasi Dengan Pembaruan Energi.

Meningkatnya Ratio Elektrifikasi Dengan Pembaruan Energi diukur melalui Rasio Elektrifikasi sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.12
Meningkatnya Ratio Elektrifikasi Dengan Pembaruan Energi

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.1.7	Meningkatnya ratio elektrifikasi dengan pembaruan energi	Rasio Elektrifikasi	%	80	85	83,72	98,49

Pada tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, realisasi data rasio elektrifikasi untuk Tahun 2021 adalah 98,49%. Data dimaksud disajikan oleh perangkat daerah terkait. Indikator rasio elektrifikasi mencapai 83,72% sehingga capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya rasio elektrifikasi dengan pembaruan energi tahun 2021 dapat dicapai dengan realisasi kinerja kriteria sedang.

Tujuan 2.2 : Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Bagi Seluruh Masyarakat.

Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Bagi Seluruh Masyarakat diukur melalui Persentase Permukiman Layak Huni, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.13
Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan bagi Seluruh Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.2	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	Persentase Permukiman Layak Huni	%	25	20	15	75

Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi pengukuran kinerja adalah sebesar 75%, sehingga indikator persentase permukiman layak huni hanya dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat rendah.

Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni diukur melalui Persentase Rumah Layak Huni sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3.14
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.2.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	36	30	38,02	126,73

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 126,73%, yang berarti bahwa kinerja sasaran pada tahun ini belum dapat dicapai dengan realisasi kinerja tinggi.

Tujuan 2.3 : Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas diukur melalui Persentase Permukiman Layak Huni, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.15
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

No	Tujuan	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.3	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	82	>80	>80	100

Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi pengukuran kinerja menunjukkan bahwa data capaian kinerja sasaran pada tahun ini tidak dapat disajikan.

Sasaran 2.3.1 : Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih diukur melalui Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3.16
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.3.1	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	%	49,40	43	55,46	128,97

Dari pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 128,97%. Indikator persentase rumah tangga dengan akses air bersih layak mencapai 55,46%, yang berarti bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil melewati target yang ditetapkan atau dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Sasaran 2.3.2 : Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi (Limbah, Sampah dan Drainase) Berwawasan Lingkungan

Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi (Limbah, Sampah dan Drainase) Berwawasan Lingkungan diukur melalui Rata-rata capaian rumah tangga bersanitasi layak (limbah, sampah, drainase) sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.17
Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi (Limbah, Sampah dan Drainase) Berwawasan Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.3.2	Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan drainase) berwawasan lingkungan	Rata-rata capaian rumah tangga bersanitasi layak (limbah, sampah, drainase)	%	81,36	47	81,38	109,97

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 109.97%. Indikator rata-rata capaian rumah tangga bersanitasi layak (limbah, sampah, drainase) mencapai 81,38%. Hal ini menunjukkan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan realisasi kinerja sangat tinggi.

Sasaran 2.3.3 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan diukur melalui Jumlah Desa STBM sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3.18
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.3.3	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	Desa	10	3	0	0

Realisasi kinerja sasaran ini adalah 0%. Target jumlah desa yang menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebanyak 3 desa, tapi tidak terlaksana dengan kendala dana yang tidak tersedia.

Sasaran 2.3.4 : Meningkatnya Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana diukur melalui Indeks Resiko Bencana sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3.19
Meningkatnya Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
2.3.4	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	indeks	Tinggi	Sedang	Tinggi	Belum tercapai

Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana dengan indikator indeks resiko bencana adalah kategori tinggi.

Secara geografis, tingkat bahaya tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Tingkat bahaya sedang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya rendah terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit.

Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim

Tujuan 3.1: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.20
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas

No	Tujuan	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
3.1	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,85	2,00	-1,85	-92,5 Tidak tercapai (dampak COVID-19)

Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi pengukuran kinerja adalah hanya sebesar -92,5% . Indikator pertumbuhan ekonomi mencapai -1,85% (data BPS April 2021). Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut terdampak pandemi COVID-19 sehingga menurun drastis layaknya yang terjadi di tingkat nasional dan banyak wilayah lainnya di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

Meningkatnya Pemerataan Pendapatan diukur melalui Indeks Gini sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.21
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
3.1.1	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indek Gini	%	0,34	0,342	0,321	106,54

Dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan, maka realisasi kinerja adalah sebesar 106,14% yang menunjukkan capaian realisasi indikator dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Tujuan 3.2: Terwujudnya Ekonomi Masyarakat yang Kuat

Terwujudnya Ekonomi Masyarakat yang Kuat diukur melalui Pendapatan Perkapita, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.22
Terwujudnya Ekonomi Masyarakat yang Kuat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
3.2	Terwujudnya Ekonomi Masyarakat yang kuat	Pendapatan Perkapita	juta/ kapita/ tahun	53,18	51,81	54,80	105,77

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tujuan terwujudnya ekonomi masyarakat yang kuat, diketahui bahwa realisasi kinerja adalah sebesar 105,77%. Indikator pendapatan per kapita mencapai 54,80 juta/kapita/tahun.

Sasaran 3.2.1: Meningkatnya Kesempatan Kerja

Meningkatnya Kesempatan Kerja diukur melalui Nilai Investasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.23
Meningkatnya Kesempatan Kerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
3.2.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	miliar rupiah	-	150	6,482	0,004
		Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,98	3,50	2,29	152,82
Rata-Rata Capaian Kinerja							76,41

Nilai Investasi yang diharapkan tumbuh di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh dari target yang sudah ditentukan, yaitu hanya mencapai 0,004 persen. Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa kedua realisasi kinerja sasaran adalah sebesar 76,41 persen yang menunjukkan capaian realisasi indikator dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang tinggi. Indikator investasi belum ada realisasi dan indikator tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,29 persen, artinya penanganan tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dapat terlaksana dengan baik dengan capaian 152,82 persen.

Sasaran 3.2.2: Terkendalnya Inflasi Daerah

Terkendalnya Inflasi Daerah diukur melalui Tingkat Inflasi, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.24
Terkendalnya Inflasi Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
3.2.2	Terkendalnya inflasi daerah	Tingkat Inflasi	%	3,19	3,90	3,19	122,25

Untuk pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas masih menggunakan data dari BPS namun sama seperti tahun sebelumnya, BPS hanya melakukan survey tingkat inflasi ini hanya di dua daerah, Kota Padang dan Bukittinggi. Diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 122,25% dengan indikator tingkat inflasi mencapai 3,19% (data BPS tahun 2019).



Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani

Tujuan 4.1: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.25
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
4.1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indek RB	indeks	C	B	C	Tidak tercapai

Untuk Tahun 2021, masih ditampilkan Indeks RB tahun 2020 karena untuk Tahun 2021 belum diumumkan oleh Kemenpan RI. Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 mendapat Indeks RB “C” dengan nilai 42,76. Kinerja sasaran pada Tahun ini belum diketahui capaian target yang diperoleh.

Sasaran 4.1.1: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.26
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan masyarakat	indeks	75,90	85	78,64	92,51

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran ini adalah sebesar 92,51% dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 78,64%. Hal ini menunjukkan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.



Tujuan 4.2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur melalui Opini BPK dan Nilai SAKIP, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.27
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK		WDP	WTP	WDP	-
		Nilai SAKIP		B	B	B	-
Rata-Rata Capaian Kinerja							

Untuk kedua indikator diatas, pada tahun 2021 realisasi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 dengan predikat WDP, begitu juga dengan Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RI dengan predikat B.

Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Tujuan 5.1: Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Sasaran 5.1.1: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya diukur melalui Jumlah MHA yang dilestarikan, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3.28
Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Luhur Budaya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
5.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	4	5	2	40%

Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi pengukuran kinerja adalah sebesar 40%. Indikator jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilestarikan mencapai 2 MHA, yang berarti bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun ini sangat rendah.

Masyarakat Hukum Adat dimaksud adalah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sampai akhir tahun 2021 ada 2 MHA yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2021 yaitu:

1. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sakerebau Maileppet di Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (tanggal 25 November 2021).
2. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 405 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sibagau di Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (tanggal 26 November 2021).

Tujuan 5.2: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis diukur melalui Tingkat Kriminalitas, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.29
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Harmonis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
5.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	%	0,33	3,00	3,00	100

Dari tabel pengukuran di atas, diketahui bahwa realisasi pengukuran kinerja adalah sebesar 100%. Indikator tingkat kriminalitas mencapai 3,00% memperlihatkan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa besaran capaian kinerja

tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis pada tahun ini dapat dicapai dengan realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Sasaran 5.2.1: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender

Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender diukur melalui Tingkat Kabupaten Layak Anak dan Indeks Pembangunan Gender, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3.30
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/ Impact)	Satuan	Kondisi 2020	2021		
					Target	Realisasi	%
5.2.1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	Tingkat	-	Pratama	-	Belum tercapai
		Indek Pembangunan Gender	%	-	89,68	89,81	100,14

Dari tabel pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2021 data kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah mencapai 100,14 persen dengan capaian 89,81 persen dari target 89,68 persen.

3.4 Realisasi Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II mengenai Indikator Kinerja Daerah, maka dalam tabel berikut disampaikan realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2021 terhadap masing-masing aspek penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2021

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	-1,85%	3,50%	-1,85	Tidak Tercapai
2	Laju inflasi (%)	%	3,19	3,90%	3,19	Tercapai
3	PDRB per kapita (Rp.juta)	Rp.jt/kapita	50,463	51,81	54,80	Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
4	Indeks Gini	%	0,34	0,33	0,321	Tercapai
5	Persentase penduduk miskin (%)	%	14,35	14,60	14,84	Tidak Tercapai
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	61,09	61,10	61,35	Tercapai
7	Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	7,09	7,10	7,2	Tercapai
8	Angka harapan hidup (tahun)	Tahun	64,73	64,7	64,73	Tidak Tercapai
9	Angka Melek Huruf	%	88,15	99,53	91,59	Tidak Tercapai
10	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,98	3,50	2,29	Tercapai
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,90	85	78,64	Tidak Tercapai
ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	APK PAUD	%	46,20	78,0	48,30	Tidak Tercapai
	APK SD	%	112,33	100	112,32	Tercapai
	APK SMP	%	119,41	85,0	119,41	Tercapai
	APM SD /MI/ paket A	%	90,45	100	89,66	Tidak Tercapai
	APM SMP SMP /MTS/ Paket B	%	60,65	60,7	62,90	Tercapai
	Persentase kelulusan kesetaraan	%	100	100	100	Tercapai
	Rata-rata Mapel Asesmen Nasional SD = 7	%	100	100	-	Tidak Tercapai
	Rata-rata Mapel Asesmen Nasional SMP = 7	%	100	100	-	Tidak Tercapai
	Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	%	69,43	100	82,38	Tidak Tercapai
	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	%	81	100	-	Tidak Tercapai
	Huruf Persentase sekolah akurat dapodik	%	90	100	100	Tercapai
	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	%	1	1,5	100	Tercapai
	Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	%	10	22	26	Tercapai
	Angka Melek Huruf	%	88,15	99,53	91,59	Tidak Tercapai
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	%	63,57	70	82,71	Tercapai
	Cakupan Desa UCI	%	80,40	72	76,74	Tercapai
	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	/1000 KH	20	25	22,7	Tercapai
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	/1000 KH	356	325	207	Tercapai
	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	%	6,4	<5	2,15	Tercapai
	Angka Morbiditas	%	98,94	15,15	12,23	Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
	Akreditasi Rumah Sakit		D	B	D	Tidak Tercapai
	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Puskesmas	10	12	-	Tidak Tercapai
	Rata-rata lama pasien dirawat	Hari	7	6	4,28	Tercapai
	Jumlah Desa dengan PHBS	Desa	0	15	15	Tercapai
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	Jalan Mantap	%	24,05	6,5	12,72	Tercapai
	Persentase Penyedia Jasa yang Memiliki Tenaga Kerja Konstruksi Terampil Bersertifikat	%	0	2	2	Tercapai
	Persentase pemanfaatan Sumber Air Baku untuk air bersih	%	0	15	25	Tercapai
	Cakupan jaringan irigasi	ha	0	21	46	Tercapai
	Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	%	0	6,3	27,19	Tercapai
	Ketaatan terhadap RTRW	%	1	35	45	Tercapai
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	1	6	1	Tidak Tercapai
	Persentase gedung pemerintah yang siap pakai	%	100	100	100	Tercapai
	Persentase Sistem Pengelolaan air minum dalam keadaan baik (debit air stabil = 9 ltr/dtk)	%	63	85	64,7	Tidak Tercapai
	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	%	0	45	10	Tidak Tercapai
	Persentase lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	%	30	25	81,11	Tercapai
	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	%	0	65	40	Tidak Tercapai
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	%	18	10	12	Tercapai
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	62	55	43	Tercapai
	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	%	62	60	36	Tidak Tercapai
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Persentase Penegakan PERDA	%	85	85	65	Tidak Tercapai
	Persentase bencana tertangani	%	100	100	100	Tercapai
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>) Penanggulangan Bencana	menit	20	15	15	Tercapai
	Persentase kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	%	70	100	100	Tercapai
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	Persentase penurunan PMKS	%	3	91,4	17,5	Tidak Tercapai
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	%	100	100	100	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	72, 39	Tidak Tercapai
	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	%	100	100	100	Tercapai
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	Persentase Tenaga Kerja dilatih yang telah bekerja	%	100	18	95	Tercapai
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	85	1	75	Tercapai
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera	%	1	36	36	Tercapai
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	Tercapai
	Persentase pemenuhan hak anak	%	100	100	100	Tercapai
	Kecamatan layak Anak	kec	3	5	5	Tercapai
	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100	100	100	Tercapai
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	Skor Indeks Ketahanan Pangan		53	55	53,3	Tidak Tercapai
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
	Persentase Luas lahan negara Bersertifikat	%	0	8	7,02	Tidak Tercapai
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	Persentase Sampah yang dikelola	%	83	6	14,35	Tercapai
	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	%	100	100	100	Tercapai
	luas kawasan perlindungan setempat yang dikonservasi	ha	6.907	350	0	Tidak Tercapai
	Persentase pembangunan sesuai dengan peruntukkan ruang	%	100	100	0	Tidak Tercapai
	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	MHA	4	5	2	Tidak Tercapai
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	101,19	99,10	99,11	Tercapai
	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	%	93,35	90,10	90,40	Tercapai
	Persentase data kependudukan yang valid dan update	%	95	82	80	Tidak Tercapai
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Persentase Desa dengan penyusunan perencanaan dengan tepat waktu	%	95	90	85	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	%	85,76	90	97	Tercapai
	Persentase BUM des yang mandiri	%	0	1,50	0	Tidak Tercapai
	Desa tertinggal	Desa	16	15	12	Tidak Tercapai
	Desa Maju	Desa	6	7	5	Tidak Tercapai
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Lembaga	3	3	2	Tidak Tercapai
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	Rasio Akseptor KB	%	03,06	59	59,80	Tercapai
	Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera	%	0	3	0	Tidak Tercapai
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	%	70	80	80	Tercapai
	Jumlah orang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	kali	127.498	286.760	145.206	Tidak Tercapai
	Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	ton	502.964	638.456	52.669	Tidak Tercapai
	Jumlah orang melalui bandara per tahun	orang	-	105	1.032	Tercapai
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap media informasi publik	%	75	80	80	Tercapai
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE	%	10	20	35	Tercapai
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	Cakupan bina kelompok UKM Produktif (Modal diatas 50 jt)	%	11	35	40	Tercapai
	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	%	1	2	3	Tercapai
	Pertumbuhan koperasi	%	2,35	1,80	2	Tercapai
	Persentase Koperasi aktif	%	25,30	40	20	Tidak Tercapai
	Persentase koperasi sehat	%	15,66	7	58,82	Tercapai
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	9,88	1,50	2	Tercapai
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	Persepsi kemudahan berinvestasi		75	75	-	Tidak Tercapai
	Jumlah rencana investasi	MoU	0	5	0	Tidak Tercapai
	Rata-rata lama Pengurusan izin investasi	hari	1	6	5	Tercapai
	Pertumbuhan realisasi investasi	%	0	1	0,3	Tidak Tercapai
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	organisasi	9	10	8	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
	Jumlah Prestasi olahraga	Cabang olahraga	4	9	8	Tidak Tercapai
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	%	85	80	85	Tercapai
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	Jumlah Perangkat daerah yang menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi	OPD	36	36	1	Tidak Tercapai
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	Persentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	%	3	60	3	Tidak Tercapai
	Jumlah sanggar yang dibina	sanggar	4	4	4	Tercapai
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	Persentase Perpustakaan yang sesuai dengan SN Perpustakaan	%	2	5	0	Tidak Tercapai
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	3	12	3,5	Tidak Tercapai
	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	%	0	60	42,7	Tidak Tercapai
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tangkap	ton	7698,17	9.500	8.694,56	Tidak Tercapai
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	ton	117,566	500	308,14	Tidak Tercapai
	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	%	7	15	16	Tercapai
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	1.105	10.000	9.000	Tidak Tercapai
	jumlah wisatawan domestik	orang	85.000	700.000	500.000	Tidak Tercapai
	PAD sektor pariwisata	miliar	1,2268	9	0,7979	Tidak Tercapai
	Lama kunjungan wisata	hari	14	7	6	Tidak Tercapai
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	%	70	80	85	Tercapai
	Produktivitas Pertanian dan Peternakan					
	pisang	kwintal	550.000	675.000	42	Tidak Tercapai
	cengkeh	ton	2.400	2.300	549	Tidak Tercapai
	keladi	kwintal	14.500	15.000	143	Tidak Tercapai
	kelapa	ton	17.500	18.000	14.500	Tidak Tercapai
	Sagu	ton	975	1.000	1.000	Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
	Sapi	ekor	1.321	2.800	1.521	Tidak Tercapai
	Babi	ekor	31,836	25.760	42.510	Tercapai
	Unggas	ekor	114.828	70.000	63.239	Tidak Tercapai
	Persentase Bina kelompok Tani yang produktif	%	30	30	50	Tercapai
	Penyakit Hewan yang tertangani	%	80	100	100	Tercapai
	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	80	100	50	Tidak Tercapai
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	Pertumbuhan Nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	%	3	2,80	1,8	Tidak Tercapai
	Pertumbuhan usaha perdagangan	%	10	9	6	Tidak Tercapai
	Realisasi Retribusi Pasar	%	80	90	74,43	Tidak Tercapai
	Persentase ketaatan usaha dagang tertib niaga	%	80	85	70	Tidak Tercapai
	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu	%	<8	<8	2,6	Tercapai
	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar wilayah	%	<13	<12	7,4	Tidak Tercapai
	Persentase Usaha Dagang Tertib Ukur	%	80	80	78	Tidak Tercapai
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) industri	%	15	20	15	Tidak Tercapai
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun litigasi	%	60	85	75	Tidak Tercapai
	Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	%	0	3	3	Tercapai
	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	%	100	93	80	Tidak Tercapai
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	%	0	25	0	Tidak Tercapai
	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	%	83,33	80	80,56	Tercapai
	Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	%	73,97	90	82,11	Tidak Tercapai
4.02	SEKRETARIAT DPRD					
	Tingkat kehadiran Pimpinan dan anggota DPRD	%	90	80	80	Tercapai
	Persentase Pertemuan dengar pendapat yang ditindaklanjuti	%	90	22	17	Tidak Tercapai
	Persentase Ranperda yang disetujui	%	50	80	28,57	Tidak Tercapai
	Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	hari	5	5	4	Tidak Tercapai
	persentase usulan masyarakat melalui reses/monev menjadi pokok pikiran DPRD	%	50	70	30	Tidak Tercapai
	Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	%	50	72	65	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01	PERENCANAAN					
	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	Tercapai
	Konsistensi Program RPJMD kedalam Renstra OPD	%	100	100	100	Tercapai
	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	%	100	100	100	Tercapai
5.02	KEUANGAN					
	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	69,44	95	70	Tidak Tercapai
	Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	%	70	75	65	Tidak Tercapai
	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	4,19	8	3,75	Tidak Tercapai
5.03	KEPEGAWAIAN					
	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	%	50,17	100	90	Tidak Tercapai
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat jabatan	%	1,18	100	0	Tidak Tercapai
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	%	1	2	-	Tidak Tercapai
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					
	Persentase tindak lanjut temuan	%	69,7	80	77,76	Tidak Tercapai
	Penurunan temuan BPK	%	0	90	77,76	Tidak Tercapai
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	36,11	85	100	Tercapai
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	Kecamatan					
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		B	B	B	Tercapai
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	Persentase ormas aktif	%	70	65	85	Tercapai
	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	%	60	100	100	Tercapai
	potensi gangguan keamanan yang tertangani	%	90	100	100	Tercapai
	persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100	Tercapai
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	%	80	70	70	Tercapai
	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	Tercapai
	Persentase IKM Perangkat daerah kategori baik		C	B	C	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
	Persentase LKjIP OPD Kategori baik		50	60	72,22	Tercapai
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)		95	95	-	Tidak Tercapai
2	Angka kriminalitas (%)		0,033	3,0	3,0	Tercapai
3	Rasio ketergantungan (%)		64	62,3	60	Tercapai

3.5 Analisis Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah antara lain penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan yang perlu selalu menjadi perhatian antara lain:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.



3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Selain itu, kebijakan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama di sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

Terkait dengan defisit riil pada Tahun 2017-2021, dilakukan analisis untuk memberikan gambaran tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.



Berikut disajikan data terkait dengan penutup defisit riil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021.

Tabel 3.5
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	778.220.949.975	45.358.184.273	40.063.395.065	34.866.883.725,51	31.885.136.169,37
2.	Belanja Daerah	986.844.044.105	900.575.703.006	987.162.174.108	705.633.482.876,00	744.626.919.518
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	200.000.000	14.476.235.800	6.000.000.000	0	0
A	Surplus (Defisit) Riil	(208.823.094.130)	12.969.319.452	24.114.787.656	11.247.669.093,51	52.260.965.119,37
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	107.662.923.270	11.835.939.277	29.950.726.933	0	32.987.630.423,74
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	201.611.472.799	188.430.038.960	11.835.939.277	29.950.726.933,23	32.987.630.423,74
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	188.430.038.960	107.662.923.270	12.278.848.379	41.198.396.026,74	85.248.595.543,11

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cenderung meningkat. Namun pada Tahun 2021 terjadi peningkatan hal ini menandakan bahwa penyerapan pelaksanaan anggaran pada tahun berkenaan terdapat penurunan yang salah satunya karena kondisi COVID- 19 yang membuat kurang efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan.



3.6 Realisasi Capaian Keuangan

Berkenaan dengan Realisasi Kinerja berdasarkan realisasi Capaian keuangan pada Tahun Anggaran 2021, maka persentasenya keuangan mencapai 82,09% dengan gambaran dari Jumlah pagu APBD yang dianggarkan sebesar Rp. 907.054.073.744; yang terealisasi sebesar Rp. 744.626.919.518,- dengan rincian realisasi anggaran per perangkat daerah digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.6
Realisasi Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2021

NO	DINAS/ BADAN/ KANTOR/ UNIT KERJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG			
		JUMLAH PAGU	REALISASI			JUMLAH PAGU	REALISASI			JUMLAH PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	% KEU	% FISIK		KEUANGAN	% KEU	% FISIK		KEUANGAN	% KEU	% FISIK
1	SEKRETARIAT DAERAH	12.044.586.265	11.791.487.869	97,89		31.261.871.102	29.147.738.400	93,07		43.306.457.367	40.939.226.269	94,53	
2	SEKRETARIAT DPRD	12.460.045.095	11.911.175.257	95,59		19.030.702.868	17.017.365.977	89,42		31.490.747.963	28.928.541.234	91,86	
3	INSPEKTORAT	3.925.642.978	3.787.334.792	96,47		5.435.914.956	4.791.472.878	88,14		9.371.557.934	8.578.807.670	91,54	
4	BAPPEDA	3.181.180.661	3.106.258.068	97,64		5.186.159.492	4.460.870.174	86,01		8.367.340.153	7.567.128.242	90,43	
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	27.238.305.593	24.183.795.821	88,78		122.828.450.452	61.422.232.415	50,01		150.066.756.045	85.606.028.236	57,04	
6	BKPSDM	4.224.958.218	3.961.273.940	93,75		3.266.462.156	2.923.437.806	89,49		7.491.420.374	6.884.711.746	91,90	
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.059.746.163	6.821.572.165	96,62		9.617.287.983	7.898.780.681	82,13		16.677.034.146	14.720.352.846	88,26	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA	119.822.744.782	111.717.434.089	93,25		56.712.214.954	35.035.732.107	61,77		176.534.959.736	146.753.166.196	83,12	
9	DINAS KESEHATAN	33.701.169.059	33.010.568.614	97,95		80.682.774.471	61.669.945.207	76,43		114.383.943.530	94.680.513.821	82,77	
10	DINAS PUPR	6.511.849.125	6.336.528.683	97,30		154.670.925.835	131.745.386.098	85,17		161.182.774.960	138.081.914.781	85,66	
11	DISPARPORA	4.179.742.389	4.085.495.603	97,74		3.787.875.500	3.689.638.012	97,40		7.967.617.889	7.775.133.615	97,58	
12	DINAS KOPERASI UKM PERINDAG	2.604.594.174	2.488.221.443	95,53		4.769.284.800	3.480.070.558	72,96		7.373.878.974	5.968.292.001	80,93	
13	DINAS DUKCAPIL	2.712.388.481	2.648.624.628	97,64		3.549.824.300	2.120.122.996	59,72		6.262.212.781	4.768.747.624	76,15	
14	DINSOS P3A	3.248.242.702	3.025.550.812	93,14		3.820.044.050	3.621.706.852	94,80		7.068.286.752	6.647.257.664	94,04	
15	DINAS PERIKANAN	3.946.578.115	3.870.289.559	98,06		17.255.356.884	16.439.897.645	95,27		21.201.934.999	20.310.187.204	95,74	
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.901.156.528	4.608.208.570	94,02		17.563.887.495	15.250.212.504	86,82		22.465.044.023	19.858.421.074	88,39	
17	DPMPSTP	2.454.306.920	2.351.084.171	95,79		1.808.174.900	1.512.583.364	83,65		4.262.481.820	3.863.667.535	90,64	
18	DINAS DPMDP2KB	3.669.094.466	3.487.774.268	95,05		6.255.359.898	4.274.430.755	68,33		9.924.454.364	7.762.205.023	78,21	
19	DINAS PERUMWASKIM	2.671.405.139	2.503.315.134	93,70		4.817.938.376	4.474.409.759	92,86		7.489.343.515	6.977.724.893	93,16	



NO	DINAS/ BADAN/ KANTOR/ UNIT KERJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG			
		JUMLAH PAGU	REALISASI			JUMLAH PAGU	REALISASI			JUMLAH PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	% KEU	% FISIK		KEUANGAN	% KEU	% FISIK		KEUANGAN	% KEU	% FISIK
20	DINAS LHK	2.843.246.658	2.748.431.918	96,66		2.430.999.480	2.178.107.620	89,59		5.274.246.138	4.926.539.538	93,40	
21	DINAS ARSIPUS	2.599.561.078	2.546.649.398	97,96		968.883.450	942.944.684	97,32		3.568.444.528	3.489.594.082	97,79	
22	DISKOMINFO	2.614.455.859	2.505.165.957	95,81		5.299.616.514	4.576.992.559	86,36		7.914.072.373	7.082.158.514	89,48	
23	SATPOL PP DAN DAMKAR	3.254.372.074	3.131.437.289	96,22		6.288.767.673	5.748.716.884	91,41		9.543.139.747	8.880.154.173	93,05	
24	BPBD	2.864.033.318	2.781.988.400	97,13		7.518.269.778	6.874.301.354	91,43		10.382.303.096	9.656.289.754	93,00	
25	KANTOR KESBANGPOL	1.189.794.149	1.136.505.120	95,52		1.511.047.800	1.425.565.220	94,34		2.700.841.949	2.562.070.340	94,86	
26	RSUD	10.997.705.209	10.234.025.082	93,05		16.808.978.703	15.295.891.696	90,99		27.806.683.912	25.529.916.778	91,81	
27	KEC. PAGAI SELATAN	1.572.586.638	1.491.068.423	94,81		1.251.539.792	1.228.051.741	98,12		2.824.126.430	2.719.120.164	96,28	
28	KEC. SIKAKAP	2.241.200.735	2.170.919.939	96,86		673.083.382	649.395.403	96,48		2.914.284.117	2.830.315.342	97,11	
29	KEC. PAGAI UTARA	1.515.820.598	1.435.667.992	94,71		925.566.150	858.053.300	92,70		2.441.386.748	2.293.721.292	93,95	
30	KEC. SIPORA SELATAN	2.339.229.976	2.239.431.039	95,73		961.281.096	852.626.030	88,69		3.300.511.072	3.92.057.069	93,68	
31	KEC. SIPORA UTARA	1.816.642.676	1.729.705.019	95,21		996.579.142	975.008.215	97,83		2.813.221.798	2.704.713.234	96,14	
32	KEC. SIBERUT SELATAN	1.837.900.420	1.748.397.900	95,13		920.245.195	904.474.292	98,28		2.758.145.615	2.652.872.192	96,18	
33	KEC. SIBERUT BARAT DAYA	1.444.636.630	1.401.758.687	97,03		819.861.825	806.312.398	98,34		2.264.498.455	2.208.071.085	97,50	
34	KEC. SIBERUT TENGAH	1.460.803.360	1.369.797.125	93,77		962.056.000	909.352.000	94,52		2.422.859.360	2.279.149.125	94,06	
35	KEC. SIBERUT UTARA	1.885.750.010	1.825.106.558	96,78		1.044.778.226	1.005.602.900	96,25		2.930.528.234	2.830.709.458	96,59	
36	KEC. SIBERUT BARAT	1.110.844.947	1.053.186.752	94,80		1.195.687.900	1.174.252.850	98,20		2.306.532.847	2.227.439.602	96,57	
	JUMLAH	293.257.908.438	277.725.464.828	94,70		613.796.165.306	466.901.454.690	76,06		907.054.073.744	744.626.919.518	82,09	

3.7 Raihan Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kendati Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai yang dibentuk dengan segala keterbatasan dan kesulitan wilayah, namun beberapa tahun terakhir telah menunjukkan prestasi serta mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Berikut beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 3.7
Daftar Penghargaan yang Diraih Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan Tahun 2021

NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	2	3
1	Event (Surfing) Of The Year Tingkat Asia Kategori Terbaik	ASC (Asian Surfing Championship)
2	Sikompak Award Bidang PNPM Kategori Pembina Fasilitator Daerah Ekstrim	Menteri PDT-RI
3	Pembina Karang Taruna Terbaik Tingkat Nasional	Menteri Sosial-RI
4	Sindo Weekly Award Kategori Sebagai Kepala Daerah bidang pembangunan kepariwisataan	Sindo Weekly
5	Penghargaan Bidang Kependudukan Tingkat Nasional	Presiden RI
6	Aksara Pratama di Bidang Pendidikan Keaksaraan Tingkat Nasional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-RI
7	Ketahanan Pangan Tingkat Nasional	Menteri Pertanian-RI
8	Penghargaan National Procurement Award Kategori Kepemimpinan pada Transformasi Pengadaan Secara Elektronik	Kepala LKPP RI
9	Penghargaan E-KKP3K Award Kategori Percepatan Pengembangan Daerah Konservasi Laut	Menteri Kelautan dan Perikanan-RI
10	Puskesmas Terbaik Tingkat Nasional Kategori Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	Menteri Kesehatan-RI
11	JKN Award Tingkat Apresiasi Madya Kategori Kabupaten Dengan Penduduk < 200.000 Jiwa	BPJS Kesehatan
12	Government Award Sebagai Kabupaten Terbaik Kategori Pendidikan	Sindo Weekly
13	Penghargaan Desa Wisata Adat	Menteri Desa PDT dan Transmigrasi-RI
14	Penghargaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PT. Askes
15	Penghargaan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Program JKN-KIS	BPJS Kesehatan



NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	2	3
16	Penghargaan Komitmen Untuk Melindungi Anak dari Dampak Rokok dan Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sehat Tanpa Rokok 2019	Ruandu Foundation
17	Penghargaan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC JKN-KIS)	BPJS Kesehatan
18	Peringkat Ketiga	Perencanaan Daerah Terbaik tingkat Provinsi Sumbar

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Selain itu untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pun telah meraih beberapa penghargaan, meliputi:

1. Instansi dengan Penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2019 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian WTP dari Kementerian Keuangan republik Indonesia.
3. Penghargaan atas Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Predikat Nilai "B" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
4. Komitmen untuk Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019;
5. Penghargaan "INAGARA" sebagai Pemerintah Daerah yang Berkomitmen Tinggi Terhadap Pengelolaan Inovasi Administrasi Negara (Tahun 2019) dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
6. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;
7. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Uma sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2020.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *clean government* dan *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, wajar, demokratis dan responsif. Berdasarkan konsep tersebut terlihat bahwa *good governance* mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekedar manajemen yang efisien dan penggunaan sumber daya yang ekonomis yang sangat berperan dalam penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan meningkatnya pengendalian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Secara umum tujuan dan sasaran Tahun 2021 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2021 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Berbagai keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara berbagai hambatan /kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya perlu disikapi dan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang serta wajib dicarikan jalan keluar atau solusinya.

Secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah



memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah baik dari segi teknis maupun manajerial di dalam pelaksanaan LKjIP untuk mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2017-2022.
3. Dalam rangka efektifitas evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selayaknya terus meningkatkan penerapan sistem teknologi informasi.
4. Membuat komitmen pemberian motivasi kerja berupa *reward* dan *punishment* terhadap pelaksana di tingkat OPD yaitu memberikan *reward* kepada OPD yang kinerjanya mencapai/melebihi target serta memberikan *punishment* kepada OPD yang capaian kinerjanya tidak/belum/masih dibawah target.